



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jend. Ahmad Yani kavling 58 (bypass) Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

Website: <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

Jakarta, 31 Mei 2023

Nomor : 435/DJU.2/PP.00.4/5/2023
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pemanggilan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023

Yth. : Hakim Tinggi, Ketua, Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palu, Jaksa, Polisi dan Peserta dari Bidang Hukum Kemenkumham Kanwil Sulawesi Tengah yang namanya tersebut dalam lampiran ini.

Sehubungan akan diselenggarakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, dimohon Saudara untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan pada tanggal **19 Juni s.d 21 Juni 2023**.
 - a. **Tempat** : **Hotel Best Western Plus Coco Palu**, Jalan Basuki Rahmat No. 127, Palu, 94113 Indonesia.
 - b. **Waktu**
 - **Check in** : Senin, Pukul 15.00 WITA s.d 18.00 WIB
 - **Pembukaan** : Senin, Pukul 19.30 WITA s.d Selesai
 - **Penutupan** : Selasa, Pukul 10.00 WITA s.d Selesai
- Pakaian:**
 - a. Pakaian Kemeja Batik Lengan Panjang (untuk acara malam hari); dan
 - b. Pakaian Kemeja Putih (senin).
 - c. Pakaian Kemeja Batik Lengan Panjang (Selasa).
2. **Wajib Menyerahkan:**
 - **Tiket Pesawat ekonomi** dan **boarding pass pergi - pulang** (PP) **YANG SAH** dari Tempat tugas/kedudukan ke tempat penyelenggaraan dan kembali ketempat kedudukan semula, bagi peserta yang menggunakan transportasi udara yang disertai **nominal harga**.
 - **Tiket kapal laut/bus** bagi peserta yang menggunakan transportasi laut atau bus harus disertai **nominal harga tiket**.
 - **Bagi peserta yang menggunakan kendaraan pribadi** diharap melampirkan **Bon Pengisian BBM**.
 - **Surat Keterangan** yang menyatakan dibebaskan dari tugas sehari-hari selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif Lingkungan Peradilan Umum;
3. **Konfirmasi kehadiran dan registrasi** peserta paling lambat tanggal 13 Juni 2023 dengan melakukan registrasi melalui : <https://bit.ly/bimtekRJPalu2023> Hal-hal lainnya yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 - Bypass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat Telp (021) 29079176 pswt 1511.
Contact Person :HP. 08161427335 (M.Rifa'i), 085782479899 (Tietie) 081314368696 (Cindy)
Email: pengembanganbadilum@gmail.com

Atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
DIREKTUR
Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Dr. LUCAS PRAKOSO, S.H., M. Hum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NOMOR : 1382/DJU/SK/PP.00.4/5/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS
KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas Pengadilan serta mewujudkan kemampuan di bidang yudisial maka diperlukan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk itu perlu menunjuk para peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif yang namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak - Hak Sipil dan Politik);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
18. Surat Edaran Bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia, dan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08HM.03.02tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
19. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Nomor 170/SEK/SK/III/2018;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2023 tanggal 30 Nopember 2022;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Peserta dibebaskan dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai **tanggal 19 Juni s.d. 21 Juni 2023**;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA-005.03.1.097450/2023 tanggal 30 November 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2023

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum;
5. Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR : 1382/DJU/SK/PP.00.4/5/2023

TANGGAL : 29 Mei 2023

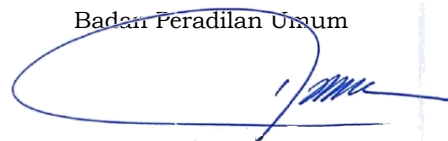
DAFTAR PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM

NO.	NAMA	GOL /RG	JABATAN	L/P	SATKER
1	2	3	4	5	6
1	Dr. DJANIKO M.H., GIRSANG, S.H., M.H.um. NIP. 19630712 198803 1 003	IV/e	WAKIL KETUA PT SULAWESI TENGAH	L	PT SULAWESI TENGAH
2	GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum. NIP. 19621127 198803 1 002	IV/e	HAKIM PT SULAWESI TENGAH	L	PT SULAWESI TENGAH
3	SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum. NIP. 19610416 198803 1 001	IV/e	HAKIM PT SULAWESI TENGAH	L	PT SULAWESI TENGAH
4	TARDI, S.H. NIP. 19630310 198402 1 001	IV/e	HAKIM PT SULAWESI TENGAH	L	PT SULAWESI TENGAH
5	TOTO RIDARTO, S.H., M.H. NIP. 19670516 199212 1 001	IV/e	HAKIM PT SULAWESI TENGAH	L	PT SULAWESI TENGAH
6	Dr. JOHANIS HEHAMONY, S.H., M.H. NIP. 19631114 199212 1 001	IV/d	KETUA PN PALU	L	PT SULAWESI TENGAH
7	FERRY MARCUS JUSTINUS SUMLANG, S.H. NIP. 19640523 198604 1 001	IV/d	HAKIM PN PALU	L	PT SULAWESI TENGAH
8	MAHIR SIKKI ZA, S.H. NIP. 19781215 200604 1 002	IV/a	HAKIM PN PALU	L	PT SULAWESI TENGAH
9	PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, S.H. NIP. 19780521 200502 1 001	IV/a	HAKIM PN PALU	L	PT SULAWESI TENGAH
10	ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H. NIP. 19810227 200604 2 003	IV/a	HAKIM PN PALU	P	PT SULAWESI TENGAH
11	BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H., M.M. NIP. 19710127 199703 1 003	IV/c	KETUA PN POSO	L	PT SULAWESI TENGAH
12	MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H. NIP. 19840112 200912 1 002	III/d	HAKIM PN POSO	L	PT SULAWESI TENGAH
13	SULAEMAN, S.H. NIP. 19820919 200904 1 006	III/d	HAKIM PN POSO	L	PT SULAWESI TENGAH
14	HARIANTO MAMONTO, S.H. NIP. 19811025 200805 1 001	III/d	HAKIM PN POSO	L	PT SULAWESI TENGAH
15	I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H. NIP. 19791026 200212 1 002	IV/b	KETUA PN LUWUK	L	PT SULAWESI TENGAH
16	AZIZAH AMALIA, S.H. NIP. 19911116 201712 2 001	III/b	HAKIM PN LUWUK	P	PT SULAWESI TENGAH
17	ROSIANI NITI PAWITRI, S.H., M.H. NIP. 19941127 201712 2 001	III/b	HAKIM PN LUWUK	P	PT SULAWESI TENGAH
18	ARRI DJAMI, S.H., M.H. NIP. 19800922 200604 1 003	IV/a	WAKIL KETUA PN TOLI-TOLI	L	PT SULAWESI TENGAH
19	YUDITH FITRI DEWANTY, S.H. NIP. 19930331 201712 2 001	III/b	HAKIM PN TOLI-TOLI	P	PT SULAWESI TENGAH
20	FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H. NIP. 19900720 201712 1 005	III/b	HAKIM PN TOLI-TOLI	L	PT SULAWESI TENGAH

21	JULIANI FRANSISKA, S.H. NIP. 19930721 201712 2 001	III/b	HAKIM PN TOLI-TOLI	P	PT SULAWESI TENGAH
22	R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H., M.H. NIP. 19730601 200604 1 002	IV/a	WAKIL KETUA PN DONGGALA	L	PT SULAWESI TENGAH
23	A AULIA RAHMAN, S.H., M.H. NIP. 19931017 201712 1 004	III/b	HAKIM PN DONGGALA	L	PT SULAWESI TENGAH
24	DANANG PRABOWO JATI, S.H. NIP. 19940915 201712 1 004	III/b	HAKIM PN DONGGALA	L	PT SULAWESI TENGAH
25	MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H., M.H.. NIP. 19920308 201712 1 006	III/b	HAKIM PN DONGGALA	L	PT SULAWESI TENGAH
26	ARZAN RAS.H.IF RAKHWADA, S.H., M.Kn. NIP. 19920523 201712 1 002	III/b	HAKIM PN DONGGALA	L	PT SULAWESI TENGAH
27	YUNIUS MANOPPO, S.H. NIP. 19780601 200312 1 002	IV/a	KETUA PN BUOL	L	PT SULAWESI TENGAH
28	AGUNG DIAN SYAHPUTRA, S.H., M.H. NIP. 19890410 201712 1 001	III/b	HAKIM PN BUOL	L	PT SULAWESI TENGAH
29	RYANDA PUTRA, S.H.,M.H. NIP. 19890510 201712 1 001	III/b	HAKIM PN BUOL	L	PT SULAWESI TENGAH
30	YAKOBUS MANU, S.H. NIP. 19780203 200312 1 001	IV/a	KETUA PN PARIGI	L	PT SULAWESI TENGAH
31	IIN FATIMAH, S.H., M.H. NIP. 19900324 201712 2 002	III/b	HAKIM PN PARIGI	P	PT SULAWESI TENGAH
32	ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H. NIP. 19940730 201712 1 004	III/b	HAKIM PN PARIGI	L	PT SULAWESI TENGAH
33	VENTY PRATIWI, S.H. NIP. 19940608 201712 2 002	III/b	HAKIM PN PARIGI	P	PT SULAWESI TENGAH
34	ISKANDAR JAYA, S.H., M.M. NIP. 19651011 199203 1 005	IV/b	PANITERA PT SULAWESI TENGAH	L	PT SULAWESI TENGAH
35	SUPRIADY, S.H. NIP. 19671017 199003 1 002	IV/a	PANITERA PN PALU	L	PT SULAWESI TENGAH
36	I WAYAN SUGIARSO, S.H. NIP. 19730402 199303 1 002	III/d	PANITERA MUDA PIDANA PN PALU	L	PT SULAWESI TENGAH
37	ZAINUDIN, S.H., MH NIP. 19680302 199203 1 003	IV/a	PANITERA PN POSO	L	PT SULAWESI TENGAH
38	CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos., S.H. NIP. 19770327 200604 1 001	III/d	PANITERA MUDA PIDANA PN POSO	L	PT SULAWESI TENGAH
39	IRNAIS, S.H. NIP. 19680413 199303 1 003	III/d	PANITERA PN LUWUK	L	PT SULAWESI TENGAH
40	NURAFNY PANGIU, S.H. NIP. 19840216 200212 2 001	III/c	PANITERA MUDA PIDANA PN LUWUK	P	PT SULAWESI TENGAH
41	ASWAR, S.H. NIP. 19670317 199303 1 006	III/d	PANITERA PN DONGGALA	L	PT SULAWESI TENGAH
42	I KETUT SUECA, S.H. NIP. 19690706 199203 1 002	III/d	PANITERA PN PARIGI	L	PT SULAWESI TENGAH

43	ARIFIN BATALIPU NIP. 19651107 198703 1 003	III/d	PANITERA PN TOLI-TOLI	L	PT SULAWESI TENGAH
44	ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H. NIP. 19660912 199403 1 001	IV/a	PANITERA MUDA PIDANA PT SULAWESI TENGAH	L	PT SULAWESI TENGAH
45	SUNARTO MAIT, S.T., M.H. NIP. 19781015 200502 1 004	IV/a	Pt. SEKRETARIS/ KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN PT SULAWESI TENGAH	L	PT SULAWESI TENGAH
46	KARTIKA AJI, S.H NIP. 19980813 202203 1 003	III/a	BIDANG HUKUM KEMENKUMHAM KANWIL SULAWESI TENGAH	L	KEMENKUMHAM KANWIL SULAWESI TENGAH
47	ARI KRISTINO, S.H NIP. 19900122 201901 1 001	III/b	BIDANG HUKUM KEMENKUMHAM KANWIL SULAWESI TENGAH	L	KEMENKUMHAM KANWIL SULAWESI TENGAH
48	DESIANTY BATALIPU, S.H NIP. 19821226 200912 2 002	III/c	KEJAKSAAN NEGERI PALU	P	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
49	ROMA ARINA TIUR SIMBOLON, S.H.,M.H NIP. 19870815 200912 2 001	III/d	KEJAKSAAN NEGERI PALU	P	KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH
50	BRIPKA MUH ASRUM, S.H		POLRESTA KOTA PALU	L	POLDA SULAWESI TENGAH
51	BRIPKA MUH JUFRI, S.H.,M.H		POLRESTA KOTA PALU	L	POLDA SULAWESI TENGAH

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

HARAP DI ISI DAN DISERAHKAN
KEPADA PANITIA PADA SAAT
REGISTRASI DAN CHECK IN

BIODATA PESERTA

Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif

Hotel Best Western Plus Coco Palu, Jalan Basuki Rahmat No. 127, Palu, 94113 Indonesia.

NAMA LENGKAP	:(nama dan gelar tulis yang benar)						
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:, <table border="1"><tr><td>Tanggal</td><td>Bulan</td><td>Tahun</td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></table>	Tanggal	Bulan	Tahun	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tanggal	Bulan	Tahun						
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>						
JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN						
PENDIDIKAN TERAKHIR	:						
JABATAN	:						
PANGKAT-GOL/RUANG	:						
NIP	:						
EMAIL / GMAIL	:						
NO HANDPHONE	:						
SATUAN KERJA	:	Pengadilan Tinggi / Negeri						
ALAMAT KANTOR	: TELEPON: FAX:						

Palu, Juni 2023
Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Penanganan Perkara
Berbasis Keadilan Restoratif

(.....)

JADWAL ACARA

BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA BERBASIS KEADILAN RESTORATIF Hotel Best Western Plus Coco Palu, Jalan Basuki Rahmat No.127, Palu, 94113.

NO.	HARI / TANGGAL WAKTU	ACARA	KETERANGAN
1.	Senin, 19 Juni 2023		
	14.00 – 17.00	<i>Check in</i> dan Registrasi	Penyelenggara/Panitia
	17.00 - 19.00	ISHOMA/Makan Malam	
	19.30 - 21.00	Acara Pembukaan : a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Hymne MA c. Pembacaan Do'a d. Laporan penyelenggara e. Sambutan KPT Palu f. Sambutan, Pembukaan dan Pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Pembawa Acara Seluruh Hadirin Peserta Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
	21.00 – 21.45	<i>Pre test</i> <i>Coffee Break</i>	
2.	Selasa, 20 Juni 2023		
	06.00 – 07.30	Sarapan	Penyelenggara
	07.30 – 08.00	Presensi peserta	Penyelenggara/Panitia
	08.00 – 10.00	Perkembangan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam penegakan hukum di Indonesia	- Wakil Direktur Sekolah kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30 – 12.00	Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) dalam tahap penyelidikan menurut perspektif Kepolisian.	- Kepolisian Resort Sulawesi Tengah
	12.00 – 13.30	ISHOMA/Makan Siang	
	13.30 – 15.30	Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada tahap penuntutan menurut Penuntut Umum	- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum	- Wakil Ketua PT. Pekanbaru
	18.00 – 19.00	ISHOMA/Makan Malam	
	19.00-20.30	Lanjutan simulasi Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum.	- Wakil Ketua PT. Pekanbaru - Wakil Direktur Sekolah kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.

3.	Rabu, 21 Juni 2023		
	06.00 – 07.30 07.30 – 08.00 08.00 – 10.00 10.00 – 10.15 10.15 – 11.00 11.00 – Selesai	Sarapan Presensi peserta Lanjutan Simulasi Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum. <i>Coffee Break</i> Ulasan Penyelesaian Perkara Pidana dalam Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>) pada Peradilan Umum. Post test Acara Penutupan: a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri c. Penutupan d. Doa e. Pembagian Sertifikat	Penyelenggara/Panitia - Wakil Ketua PT. Pekanbaru - YM. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. Pembawa Acara Peserta Panitia

Pakaian :

1. Sesi Pagi dan Siang : PDH
2. Sesi Malam : Batik/Motif Tradisional Lengan Panjang

a.n DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
u.b

Kepala Sub Direktorat
Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan



Herti Setiawati RR, S.H., M.H.